



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 60. TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi untuk mencapai arah kebijakan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dengan mengembangkan kerjasama desa;
 - b. bahwa Kerjasama Desa dan antar desa dan lembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA DESA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
8. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Antar Desa adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan Antar Desa disatu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Kerjasama Desa bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa, adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
18. Pihak Ketiga, adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.
20. Peraturan Bersama Kepala Desa, adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Keputusan Kepala Desa, adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
22. Kesepakatan Bersama, adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
23. Perjanjian Bersama, adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
24. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
25. Keadaan kahar atau (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

27. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Kerjasama Desa dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa penyelenggaraan pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan antar desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. kerjasama antar Desa;
- b. kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. bidang dan potensi Desa;
- d. badan kerjasama antar Desa;
- e. tata cara kerjasama Desa;
- f. perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. hasil kerjasama Desa;
- i. pelepasan dan evaluasi hasil kerjasama Desa;
- j. pembinaan dan pengawasan.
- k. pembiayaan;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara:
 - a. desa dengan desa lain dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. desa dengan desa lain antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Dalam hal kerjasama antar desa dengan desa di lain kabupaten dalam 1 (satu) provinsi, maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.
- (3) Pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama yang dimiliki/didirikan 2 (dua) desa atau lebih.
- (3) Kerjasama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (4) Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar desa.

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerjasama antar desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

J. F.

- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

BAB IV KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kerjasama atas prakarsa desa; dan
 - kerjasama atas prakarsa pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

Pasal 10

Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit memuat:

- ruang lingkup kerjasama;
- bidang kerjasama;
- tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- jangka waktu;
- hak dan kewajiban;
- pendanaan;
- tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
- keadaan kahar (*force majeure*); dan
- penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan APBDesa.

Pasal 12

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 13

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan dalam bidang:

- peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- peningkatan pelayanan pendidikan;
- kesehatan;
- sosial budaya;
- ketentraman dan ketertiban;



- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja; dan
- h. pekerjaan umum.

BAB V
BIDANG DAN POTENSI DESA
Pasal 14

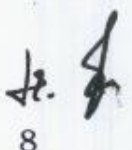
- (1) Bidang dan potensi desa yang menjadi Kerjasama Desa meliputi bidang:
 - a. pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 15

- (1) Bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB VI
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa maka dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme musyawarah antar desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:



- a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerjasama desa.
 - (4) BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 17

Pembentukan dan penetapan BKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Rawas ini.

Pasal 18

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

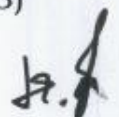
- a. membahas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar desa;
- d. melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa.

Pasal 19

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk sekretariat bersama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKAD.
- (3) Sekretariat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam kedudukannya merangkap anggota dan dipilih dalam musyawarah antar desa.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 21

- (1) untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BKAD menyusun peraturan tata tertib, paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah antar desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah antar desa;
 - c. tata cara musyawarah antar desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota BKAD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah antar desa.
- (2) Peraturan tata tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah antar desa.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BKAD paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diusulkan kembali.
- (2) Apabila keanggotaan BKAD telah berakhir tetapi belum ditetapkan anggota yang baru, maka anggota BKAD yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya anggota BKAD yang baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA DESA Bagian Kesatu Kerjasama antar Desa

Pasal 23

- (1) Kerjasama antar desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa;
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerjasama desa;
 - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;

- e. bidang dan potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil musyawarah desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan potensi desa;
 - 2. ruang lingkup kerjasama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;
 - d. hasil musyawarah desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil musyawarah desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing pada saat musyawarah desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;

- e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati;
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan:
- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD;
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar desa.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerjasama atas Prakarsa Desa
Pasal 24

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga atas prakarsa desa dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi atas bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;

- b. bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam musyawarah desa;
 - c. bidang dan potensi desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerjasama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Daerah terkait bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada pihak ketiga dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari pihak ketiga; dan
 - d. hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;

- e. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat, maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh Pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 25

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerjasama dengan desa sesuai dengan bidang dan potensi desa.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam musyawarah desa.



- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.

BAB VIII

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 26

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Kerjasama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah atau nasional; dan
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 28

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Kerjasama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan Kerjasama Desa pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama antar desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerjasama desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan, dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa uang merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening kas desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama desa berupa barang menjadi aset desa.

Pasal 31

Hasil pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 32

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam musyawarah desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Kerjasama Desa dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 36

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan Kerjasama Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dibebankan pada APBDesa dan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerjasama.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Kerjasama Desa dan Lembaga Kerjasama Desa yang saat ini masih berjalan, tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerjasama dan kepengurusannya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, *13 Desember* 2023

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, *13 Desember* 2023

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ~~2023~~ NOMOR ~~60~~

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006